

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara, Anselmus Pila Ndilu, 20310108.

Rumusan masalah yang dikaji oleh Penulis adalah: 1). Apa Modus terjadinya Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara?. 2). Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara?, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Modus terjadinya tindak pidana pemilu oleh Aparatur Sipil Negara, serta Pertimbangan hakim terhadap Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini bersifat Deskriptif, dan Jenis Penelitian ini adalah Normatif. Variabel Bebas dalam Penelitian ini adalah Modus terjadinya Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara dan Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara. Variabel Terikat dalam Penelitian ini adalah Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan maka yang menjadi Kesimpulan adalah: 1). Modus terjadinya Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara. a). Terdakwa berperan aktif sebagai juru Kampanye dan aktif berbicara dalam Kampanye tersebut dengan mengajak Masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu. b). Terdakwa, pada saat menghadiri kegiatan kampanye, mengajukan sebuah pertanyaan yang di dalamnya memuat pernyataan yang mengarahkan dukungan kepada pasangan calon tertentu. 2). Pertimbangan hakim terhadap Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara. a). Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum. b). Keadaan yang memberatkan dan meringankan, c) terdakwa bebas dari segala tuntutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :1). Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana Pemilu hendaknya dalam menerapkan hukum harus memiliki pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci, sehingga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. 2). Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai Pejabat Publik harus bersifat netral dalam Pilkada dan juga menjadi panutan bagi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilu, Aparatur Sipil Negara.

ABSTRACT

Description of Election Criminal Offenses by Civil Servants Anselmus Pila Ndilu, 20310108.

The research problems addressed by the author are: 1) What are the modes of election criminal offenses committed by Civil Servants?. 2) What are the judges' considerations regarding election criminal offenses committed by Civil Servants? This study aims to identify the modes in which election criminal offenses are committed by Civil Servants and to analyze the judges' considerations in adjudicating such cases. This is a descriptive study employing a normative legal research approach. The independent variables in this research are the modes of election criminal offenses committed by Civil Servants and the judges' considerations. The dependent variable is the court's decision regarding such offenses.

Based on the research and analysis, the conclusions are: 1) Modes of election criminal offenses by Civil Servants: a) The defendant actively served as a campaign spokesperson and openly encouraged the public to vote for a specific candidate pair. b) During the campaign event, the defendant posed a question which contained a statement that encouraged support for a specific candidate pair. 2) Judges' considerations regarding election criminal offenses by Civil Servants: a) The defendant's actions fulfilled the elements of the public prosecutor's indictment. b) The court considered both aggravating and mitigating circumstances. c) The defendant was acquitted of all charges.

Based on the results of the research and analysis, the author provides the following suggestions: 1) For law enforcement, especially the panel of judges, in handling election crime cases, legal application should be based on sufficient and detailed legal considerations to ensure justice for all parties. 2) For Civil Servants (ASN), as public officials, they must maintain neutrality during regional elections and serve as role models for the public in the electoral process.

Keywords: Election Crime, Civil Servants.